

Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting

Viona Erlanda^{1*}, Dida Rahmadanik²

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*Corresponding author: vionaerlanda23@gmail.com

Abstract

Stunting is a failure of growth and development that disrupts the growth of toddlers due to continuous inadequate nutrition. Malnutrition during the growth period of children at an early age will hamper physical development, increase morbidity, and hinder children's mental development until death occurs. Whereas in toddlers it causes intellectual abilities and productivity to decrease. Currently, the stunting rate in Surabaya City is in the lowest position compared to other cities/districts throughout Indonesia. This study used a qualitative research method with a descriptive approach. This research focuses on knowing what strategies are used so that the success of the stunting reduction acceleration program in the Surabaya City Government occurs. Researchers conducted data analysis using the collaborative governance theory put forward by Ansell and Gash (2007) which focuses on collaborative processes. The data collection technique used secondary data obtained from news articles online and relevant journal articles. The data analysis technique involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the collaborative process in handling stunting is going quite well and effectively. This is proven by the decreasing in the number of stunting in the city of Surabaya, which decreases every year. Reducing stunting requires support from stakeholders, the organizations involved, and the people of Surabaya City. With this, it is hoped that the Surabaya City Government will be further motivated and continue to implement the program sustainably until there are no new cases of stunting.

Keywords: Stunting, Surabaya Government, Collaborative process

I. Pendahuluan

Stunting adalah permasalahan pada gizi yang kritis di dunia, khususnya pada negara miskin dan berkembang karena negara berkembang merupakan negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih terbilang dalam jarak menengah atau sedang proses perkembangan. Stunting ini merupakan suatu tumbuh kembang yang gagal sehingga menyebabkan gangguan pada pertumbuhan balita akibat dari nutrisi yang tidak tercukupi secara terus-menerus, yang dimulai dari masa kehamilan sampai dengan usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, kesakitan meningkat, perkembangan mental anak menjadi terhambat, hingga terjadi kematian. Sedangkan pada balita menyebabkan kemampuan intelektual menurun, produktivitas dan memungkinkan mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang.

Masalah stunting dapat menghambat kondisi ekonomi dan meningkatkan kemiskinan, dalam hal ini Pemerintah hingga instruksi dari Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dikeluarkannya kebijakan tentang percepatan penurunan stunting ini agar kedepannya

masalah stunting di Indonesia dapat teratasi, yang memiliki tujuan untuk menurunkan prevalensi Sunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Indonesia memiliki tujuan untuk mengurangi kasus stunting dengan target 14% di tahun 2024, tentu hal ini bukan suatu yang mudah untuk dicapai tetapi dengan Indonesia memiliki target tersebut setidaknya pemerintah sudah melakukan sesuai tugasnya dan pemerintah tentunya terus akan berusaha demi tercapainya target yang ditetapkan oleh Presiden.

Program percepatan penurunan stunting di Indonesia sekarang belum berjalan secara efektif dan efisien, yang dapat dilihat dari kurang optimalnya koordinasi pengadaan intervensi gizi yang spesifik maupun sensitif yang berkaitan dengan proses perencanaan, anggaran, pemantauan dan proses evaluasi. Kemudian dapat kita lihat pada belum optimalnya pemanfaatan alokasi dan sumber daya serta dana. Selanjutnya kapasitas dan kualitas pengadaan program masih terbatas dan kurangnya advokasi maupun sosialisasi berkaitan pada percepatan penurunan stunting. Demi pencegahan stunting dapat berjalan dengan maksimal maka perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk dilakukan pencegahannya dengan alat pendukung seperti komitmen politik maupun kebijakan pelaksanaan dan peran aktif pemerintah hingga non-pemerintah. Dalam pencegahan tersebut, dilakukan pelaksanaan dengan cara konvergen pada tingkat Kabupaten/Kota sampai masyarakat. Menurut Global Nutrition International, konvergensi adalah suatu gerakan yang pelaksanaannya dilakukan dengan terkoordinasi, terintegrasi dan bersama-sama dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki yang bertujuan untuk dapat menetapkan sasaran prioritas keluarga stunting dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam upaya pencegahan stunting perlu dilakukan secepatnya hal ini untuk mengurangi angka stunting dan menghindari dampak pada jangka panjangnya. Pemerintah melakukan penataan perangkat pelaksanaan percepatan penanggulangan stunting dan menyusun strategi nasional (STRANAS) 2018-2024 yang berada di wilayah pusat sampai daerah. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah stunting dilakukan dengan upaya peningkatan gizi masyarakat, salah satunya melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk meningkatkan status gizi anak (Kemenkes RI, 2018).

Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, angka sunting di Indonesia tahun 2022 mencapai 21,6%. Angka ini merupakan yang terendah dari tahun sebelumnya (Annur, 2023). Selain itu, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka stunting di Provinsi Jawa Timur yaitu 19,2 persen. Jawa Timur merupakan provinsi dengan urutan ke 25 dari 34 provinsi dalam persoalan stunting pada balita (Annur, 2023). Maka, persoalan ini harus menjadi salah satu perhatian yang utama terhadap pemerintah agar terjadi penurunan kembali. Permasalahan Stunting di Jawa Timur perlu adanya penanganan multisektor. Multisektor adalah sebuah penanganan dengan menetapkan target yang jelas, penggunaan anggaran secara berbasis, penempatan wilayah implementasi program, survei stunting tiap tahun, dan pengawasan yang dilakukan masyarakat. Terdapat enam faktor terjadinya stunting di Jawa Timur, yaitu praktik pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care), pemeriksaan ibu dan bayi setelah persalinan (Post Natal Care) dan pembelajaran dini yang berkualitas. Selain itu, kurangnya makanan bergizi, kurangnya air bersih, dan terbatasnya perilaku masyarakat terhadap stunting.

Saat ini angka stunting Kota Surabaya terletak diposisi paling rendah diantara kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Pada tahun 2022 angka stunting di Surabaya yaitu turun

menjadi 4,8 persen (Databoks 2022). Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan data pada tahun 2020, angka stunting di Kota Surabaya mencapai angka 12.788 kasus. Angka tersebut menurun drastis pada tahun 2021 menjadi 6.722 kasus. Kemudian, pada tahun 2022 stunting turun menjadi 1.219 kasus. Dalam penjelasan tersebut Kota Surabaya mengalami penurunan yang konsisten terhadap stunting. Dalam hal ini, dilakukan penelitian *Collaborative Governance* pada proses kolaborasi menggunakan teori menurut Ansell & Gash (2007) agar mengetahui bagaimana keberhasilan terhadap program percepatan penurunan stunting di Pemerintah Kota Surabaya.

II. Landasan Teori

Strategi

Strategi adalah pendekatan yang berkaitan untuk melakukan pelaksanaan ide atau gagasan, perencanaan, pelaksanaan hukuman dalam waktu tertentu (Wheelen & Hunger, 2013:15). Menurut Robbins (Morissan, 2014:152) menjelaskan bahwa strategi itu sendiri merupakan suatu penentu bagi perusahaan dalam waktu jangka panjang dan sebagai penentu untuk menetapkan arah tindakan kita ingin kemana dan mendapatkan sumber-sumber yang ditentukan demi tercapainya tujuan yang sudah ditentukan. Berfikir strategi ini membuat tindakan yang akan kita lakukan menjadi terarah, kita bisa memperkirakan untuk membangun masa depan yang ingin kita capai, sebagai penentu kekuatan apa yang dapat menghalangi dan membuka tercapainya tujuan serta menyusun rencana atau pencapaian yang kita inginkan.

Stunting

Stunting merupakan suatu masalah kesehatan yang diderita oleh balita karena asupan gizi yang kurang dalam waktu yang panjang sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada tinggi badan anak yang lebih rendah atau pendek dari standar tinggi badan usianya (Kemenkes RI, 2018). Stunting adalah suatu kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dari pada tinggi badan anak lain pada umumnya yang seusianya. Tinggi badan yang tidak normal tersebut digunakan sebagai indikator ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuhnya atau malnutrisi kronik yang menggambarkan riwayat kurang gizi balita dalam jangka waktu lama (Sudargo et al., 2009).

Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash, dalam Collaborative Governance ada 4 tahap (Musleh et al., 2023), yaitu:

a) Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Kondisi awal ini adalah pemicu terjadinya keinginan para pihak yang terlibat untuk melakukan kolaborasi baik itu dari pemerintah dan lembaga lainnya. Keinginan kolaborasi timbul apabila merasakan atau mengalami kegagalan bersama, yang secara tidak langsung menumbuhkan kesetiakawanan melalui bentuk kerjasama atau kolaborasi.

b) Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Dalam desain kelembagaan aspek penting yang perlu mendapat perhatian adalah kejelasan aturan dan prosedur. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka, sehingga para pemangku kepentingan dapat meyakini bahwa setiap musyawarah dan negosiasi yang dilakukan adalah nyata.

c) Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Seorang pemimpin fasilitatif adalah seseorang yang sanggup memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama di meja perundingan, bertatap muka, membangun rasa saling percaya, berkomitmen, membuat rencana strategi, peta jalan, visi-misi dan tujuan bersama yang disepakati. Kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses kolaborasi

d) Proses Kolaborasi

Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Ada tiga tahapan proses kolaborasi yaitu *problem setting* (penentuan permasalahan), *direction setting* (penentuan tujuan), dan pelaksanaan. Adapun tahapan membentuk kolaboratif menurut Ansell dan Gash yaitu:

- 1) Dialog tatap muka (*Face to face*). Memiliki arti bahwa, dalam proses kolaborasi terdapat keterlibatan pada semua pihak dalam proses dialog dan ikut berperan dalam proses pembuatan keputusan demi kepentingan bersama.
- 2) Membangun kepercayaan (*Trust Building*). Memiliki arti bahwa, dalam proses kolaborasi harus terjalin hubungan baik demi membangun kepercayaan terhadap antar stakeholder.
- 3) Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*). Memiliki arti bahwa, dalam proses kolaborasi adanya tanggung jawab dan kesetiaan kepada stakeholder. Dalam hal ini diharapkan diharapkan mampu menghilangkan penghambat yang sering muncul akibat kepentingan antar stakeholder.
- 4) Berbagi pemahaman (*Share Understanding*). Memiliki arti bahwa, dengan berbagi pengertian dan pemahaman dalam sebuah kolaborasi menimbulkan partisipasi aktif dari para stakeholder dengan arah dan tujuan bersama.
- 5) Hasil sementara, pada tahap ini muncul sebuah kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai. Output pada proses kolaborasi dianggap hal yang penting untuk membangun kesempatan sehingga dapat mengarahkan pada keberhasilan kolaborasi.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2015), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sebagai penelitian kasus, penelitian ini berfokus untuk mengetahui strategi apa yang digunakan sehingga terjadinya keberhasilan terhadap program percepatan penurunan stunting di Pemerintah Kota Surabaya. Untuk melihat strategi pemerintah Kota Surabaya dalam menurunkan angka stunting, maka penelitian ini menggunakan teori collaborative governance pada proses kolaborasi dari Ansell & Gash, 2007) yang akan menjelaskan tentang dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, berbagi pemahaman, dan hasil sementara. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berita online dan artikel jurnal yang berkaitan. Untuk Teknik analisis data merujuk pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. Hasil dan Pembahasan

Proses kolaborasi merupakan salah satu kegiatan didalam teori collaborative governance. Proses kolaborasi ini terjadi siklus yang akan terus berputar dan berulang selama proses kolaborasi berlangsung yang dimulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen, berbagi pemahaman sampai kepada hasil yang ingin dicapai (Ansell & Gash, 2007:557). Proses kolaborasi ini berhubungan juga dengan proses keberhasilan terhadap program percepatan penurunan stunting di Pemerintah Kota Surabaya, berikut merupakan penjelasannya.

Dialog tatap muka

Dialog tatap muka ini merupakan langkah paling awal yang dilakukan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Proses ini, membangun dengan adanya sebuah komunikasi antar stakeholder yang berkaitan. Disini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur melakukan sebuah Rapat Koordinasi Pencegahan Stunting Terintegrasi di Jawa Timur yang membahas tentang dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jawa Timur dalam upaya percepatan penurunan stunting serta kasus-kasus stunting yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. BAPPEDA Jawa Timur berharap adanya kerja sama pada pemerintah seluruh Jawa Timur untuk melakukan strategi penurunan stunting. Termasuk pada pemerintah Kota Surabaya ini, Wali Kota Surabaya dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melakukan diskusi dan berdialog dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di ruang sidang Wali Kota Surabaya untuk bersama-sama membawa Surabaya zero stunting.

Dalam membawa Surabaya zero stunting dilakukannya kerja sama dengan instansi dan stakeholder yang terlibat. Mulai dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Timur, Organisasi Profesi Kesehatan, perguruan tinggi di Kota Surabaya, serta Kementerian Agama. Tidak hanya itu, pemkot Surabaya juga melakukan kerja sama di seluruh rumah sakit dan bidan, yang dimana ketika ada kelahiran bayi, maka pihak rumah sakit maupun bidan akan melaporkannya kepada Pemkot Surabaya untuk melakukan pendataan. Sementara saat pertumbuhan balita, pemkot Surabaya melakukan pengamatan secara terus-menerus yang melibatkan Kader Surabaya Hebat (KSH) dengan melalui kegiatan di Posyandu dan kegiatan datang ke masing-masing rumah masyarakat untuk mengajak anak mengukur badan. Dalam hal ini pemkot Surabaya melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan organisasi yang terlibat untuk menjalankan tugasnya.

Adanya dialog tatap muka ini, mendorong terciptanya suatu kolaborasi yang efektif dan efisien terkait penanggulangan stunting di Kota Surabaya. Selain itu, dalam dialog tatap muka yang berlangsung dengan baik akan memperkuat rasa percaya antar stakeholder maupun organisasi yang terlibat dalam proses kolaborasi ini.

Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan dibutuhkan peran kepemimpinan fasilitatif untuk membantu para stakeholder yang terlibat dalam proses kolaborasi, hal ini juga agar tidak terjadinya konflik. Selain itu, dengan melakukan dialog tatap muka membuat terbangunnya kepercayaan antar stakeholder karena adanya keterbukaan terhadap persoalan informasi stunting. Dengan hal ini pemerintah kota Surabaya melakukan dialog tatap muka seminggu sekali dan saling berunding mengenai penanganan stunting kepada stakeholder. Disini stakeholder mempunyai visi dan misi yang sama dalam membangun kepercayaan yang

berkaitan dengan penurunan angka stunting. Yang dibuktikan dengan banyaknya program yang dibuat untuk anak di kota Surabaya demi cegah stunting.

Komitmen Terhadap Proses

Komitmen tidak jauh beda dengan membangun kepercayaan. Suatu komitmen memerlukan kepercayaan agar tanggungjawab masing-masing stakeholders dapat dijalankan dengan baik. Komitmen pada proses kolaborasi perlu dengan membangun kesadaran yang saling ketergantungan antar stakeholder. Semakin bergantung, maka semakin berkomitmen terhadap hubungan yang dijalin (Abbad, dalam La Ode, 2018).

Pemkot Surabaya dari awal telah berkomitmen dalam menangani permasalahan stunting, mengingat pertambahan stunting di Indonesia sangat berdampak buruk bagi masa depan bangsa. Dalam membangun komitmen, TP PKK Bersama Pemkot Surabaya melakukan perlombaan bagi masyarakat untuk terus menurunkan angka stunting (Pemerintah Kota Surabaya, 2022). Tujuan digelarnya lomba ini adalah untuk meningkatkan komunikasi, kepedulian sosial, kesatuan dan kemanusian serta menerapkan hidup sehat dan bergizi sejak usia dini, lombanya yaitu lomba Surabaya Emas (Eliminasi Masalah Stunting) yang dibangun oleh masyarakat dengan berbagai bentuk kolaborasi. Ada tiga kelurahan yang menang dalam lomba tersebut, faktor utama dalam memenangkan lomba yaitu ketelatenan dalam memberikan makanan bergizi, keberhasilan dari TP PPK dan kemauan dari orang tuanya sendiri. Hal ini terjadinya komitmen masyarakat dalam mendukung program pemerintah dalam proses penurunan stunting. Diharapkan Eliminasi Masalah Stunting di Kota Surabaya tidak terbatas di acara ini saja, akan tetapi nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan.

Berbagi Pemahaman

Pada proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus dapat melakukan pemahaman bersama. Pemahaman bersama seperti visi bersama, misi yang sama, tujuan yang sama, arah yang jelas dan strategis dan penyelerasian pada definisi masalah. Para stakeholder yang terkait diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam rangka menemukan solusi apabila terdapat permasalahan.

Pemerintah Kota Surabaya melalui semua Kepala Perangkat Daerah (PD) bersama Ketua Tim Penggerak TP PKK Kota Surabaya, melakukan sosialisasi Program Jago Ceting atau Jagongan Cegah Stunting. Sosialisasi ini untuk mencegah stunting di Kota Pahlawan dan mengajak seluruh Kepala PD Kota Surabaya, Puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan kader-kader PKK berkolaborasi untuk mengatasi stunting karena untuk mengatasi stunting membutuhkan banyak kolaborasi dengan banyak pihak. Menurut Kepala Dinas Kesehatan, Pemkot Surabaya membuat program Jago Ceting yang diterapkan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengatakan “dalam upaya menurunkan angka stunting ini terus kita lakukan. Program Jagongan Cegah Stunting ini menyasar setiap kecamatan dan kelurahan untuk memberikan sosialisasi, membekali masalah, dan memberikan solusi agar segera bisa memberikan penanganan yang dibutuhkan.

Pendampingan terus kita lakukan, baik sebelum menikah hingga sudah menikah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Ibu Febria Rachmanita juga mengatakan bahwa “Kami juga terus memberikan pengertian dan mendorong para ibu agar tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayi mereka sebagai upaya pencegahan stunting.” Dalam upaya berbagi pemahaman, Pemerintah Kota Surabaya memberikan pengecekan

kesehatan yang secara gratis melalui program yang dibuat yaitu Universal Health Coverage (UHC) yang dapat diakses menggunakan BPJS secara gratis atau tanpa dipungut biaya.

Hasil Sementara

Hasil sementara ini merupakan output dari proses kolaborasi yang dapat dilihat dari kesuksesan awal, bentuk perencanaan yang strategis, dan lain sebagainya. Hasil sementara yang berhasil dari proses kolaborasi akan membuat stakeholder menjadi termotivasi untuk berinovasi lagi demi permasalahan stunting yang bersih. Dalam hal ini, hasil sementara strategi pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting dikatakan berhasil. Penurunan stunting di Kota Surabaya mengalami penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020 angka stunting mencapai 12.788 kasus, tahun 2021 menjadi 6.722 kasus dan tahun 2022 angka stunting menjadi 1.219 kasus. Tetapi tidak menutup kemungkinan angka stunting dapat naik kembali atau mungkin bisa turun drastis. Oleh karena itu, program stunting ini terus berlanjut serta stakeholder yang berkaitan membantu demi balita dan anak yang sehat.

V. Kesimpulan dan Saran

Proses collaborative governance dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya telah menjadi perhatian pemerintah karena yang pada tahun sebelumnya kasus stunting di Surabaya tinggi. Untuk menurunkan angka stunting ini, pemerintah berharap adanya kerjasama antar masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam menyusun strategi penurunan stunting menurut teori Ansell & Gash (2007) melalui fenomena proses kolaborasi yang dimulai dari melakukan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara yang digunakan sudah berjalan cukup baik dan efektif. Dikatakan efektif karena adanya penurunan yang konsisten sesuai dengan keinginan Pemerintah Kota Surabaya. Partisipasi masyarakat sangat berarti dalam persoalan stunting ini. Dari hasil sementara yang sudah terlihat, diharapkan Pemerintah Kota Surabaya lebih termotivasi dan tetap menjalankan program tersebut secara berkelanjutan serta memberikan berbagai inovasi terbaru yang nantinya segera untuk diimplementasikan kepada balita atau anak demi menurunkan angka stunting di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023). *Daftar Prevalensi Balita Stunting di Indonesia pada 2022, Provinsi Mana Teratas?*
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Kemenkes RI. (2018). *Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Risksdas)*. Kemenkes RI.
- La Ode, I. (2018). *Collaborative Governance, Konsep dan Aplikasi*. Deepublish Publiser.
- Morissan. (2014). *Manajemen Public Relations : Strategi Menjadi Humas Profesional*. Prenadamedia Group.
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75–90.
<https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022). *Surabaya Emas Sukses Atasi Anak Berisiko Stunting*.

- Presiden RI. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Pemerintah RI.
- Sudargo, T., Christiany, I., & Hakimi, M. (2009). Status Gizi, Asupan Zat Gizi Mikro (Kalsium, Magnesium) Hubungannya Dengan Sindroma Premenstruasi Pada Remaja Putri SMU Sejahtera Di Surabaya. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 6(1), 29–34.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2013). *Strategic Management and Business Policy Achieving Sustainability* (12th ed.). Pearson Boston.